

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Suatu negara baik negara maju maupun negara berkembang dalam mewujudkan kesejahteraan penduduknya dilakukan melalui proses pembangunan. Pembangunan dilakukan berdasarkan trilogy pembangunan. Tiga landasan pembangunan meliputi pertumbuhan ekonomi, pemerataan dan stabilitas nasional.

Pembangunan merupakan alat yang digunakan untuk mencapai tujuan bangsa dan pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator untuk menilai keberhasilan pembangunan dari suatu negara. Kemakmuran atau kesejahteraan masyarakat akan ditandai dengan meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia yang dapat tercapai jika pertumbuhan ekonomi dapat meningkatkan produktivitas (Ayu Krisna dkk, 2014; 33). Pertumbuhan ekonomi yang tidak memperhatikan manusia tidak akan bertahan lama (sustainable) karena pembangunan manusia atau peningkatan kualitas sumber daya manusia menjadi hal yang sangat penting dalam strategi kebijakan pembangunan nasional (Firda, 2014;257)

Untuk mengukur mutu modal manusia, United Nations Development Program(UNDP) mengenalkan konsep mutu modal manusia yang diberi nama Human Development Indeks atau Indeks Pembangunan Manusia(IPM). Tingkat pembangunan manusia yang tinggi sangat menentukan kemampuan penduduk dalam menyerap dan mengelola sumber-sumber pertumbuhan ekonomi, baik kaitannya dengan teknologi maupun terhadap kelembagaan sebagai sarana penting untuk mencapai pertumbuhan ekonomi (Brata, 2004).

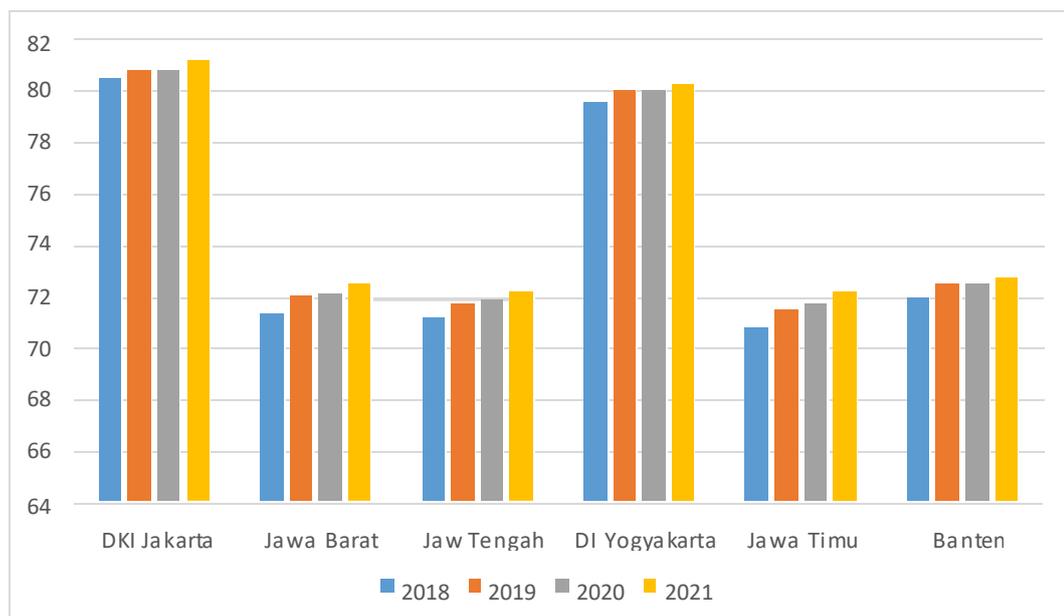
Konsep IPM pertama kali dipublikasikan UNDP melalui Human Development Report tahun 1996, yang kemudian berlanjut setiap tahun. Dalam publikasi ini pembangunan manusia didefinisikan sebagai “*a process of enlarging people’s choices*” atau proses yang meningkatkan aspek kehidupan masyarakat. Aspek terpenting kehidupan ini dilihat dari usia yang panjang dan hidup layak. Secara spesifik UNDP menetapkan empat elemen utama dalam pembangunan manusia, yaitu produktivitas (*productivity*), pemerataan (*equity*), keberlanjutan (*sustainability*), dan pemberdayaan (*empowerment*).

Salah satu cara untuk mengukur keberhasilan atau kinerja suatu negara atau wilayah dalam bidang pembangunan manusia digunakan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) atau Human Development Indeks (HDI). Indeks ini pertama kali dikembangkan oleh pemenang nobel india Amartya Sen dan Mahbub ul Haq seorang ekonomi Pakistan dibantu oleh Gustav Ranis dari Yale University dan Lord Meghnad Desai dari London School of Economics. Indeks pembangunan manusia merupakan suatu indeks komposit berdasarkan tiga indikator, yaitu: angka harapan hidup pada waktu lahir (*life expectancy at birth*), angka melek huruf penduduk dewasa (*adult literacy rate*) dan rata-rata lama sekolah (*mean years of schooling*), dan kemampuan daya beli (*purchasing power parity*). Indikator angka harapan hidup mengukur kesehatan, indikator angka melek huruf penduduk dewasa rata-rata lama sekolah mengukur pendidikan dan terakhir indikator daya beli mengukur standar hidup.

Indonesia tergolong memiliki IPM yang menengah kebawah meskipun merupakan Negara dengan wilayah yang luas serta jumlah penduduk yang besar.

Kini Indonesia menduduki peringkat 108 dari 187 negara di dunia (publikasi UNFP. Tahun 2013). Posisi peringkat IPM Indonesia merupakan akumulasi dari total angka IPM pada level provinsi yang ada di Indonesia

Setiap tahun BPS nasional terbitkan tingkat IPM dari semua provinsi yang ada di Indonesia. Tujuan diterbitkannya nilai IPM setiap provinsi adalah untuk mengetahui seberapa besar keberhasilan pembangunan pembangunan kualitas manusianya. Selain itu, dapat dijadikan sebagai sarana atau alat untuk membandingkan ketercapaian IPM setiap provinsi di Indonesia. Setelah membandingkan dapat diketahui tingkat Indeks Pembangunan Manusia di Pulau Jawa.



Gambar 1. 1 Indeks Pembangunan Manusia di Pulau Jawa Periode 2018-2021

(Sumber : Badan Pusat Statistik : Hasil Pengolahan Peneliti 2022)

Tabel 1. 1 Indeks Pembangunan Manusia di Pulau Jawa

TAHUN	DKI Jakarta	Jawa Barat	Jawa Tengah	DI Yogyakarta	Jawa Timur	Banten
2018	80,47	71,30	71,12	79,53	70,77	71,95
2019	80,76	72,03	71,73	79,99	71,50	72,44
2020	80,77	72,09	71,87	79,97	71,71	72,45
2021	81,11	72,45	72,16	80,22	72,14	72,72

(Sumber : Badan Pusat Statistik : Hasil Pengolahan Peneliti 2022)

Dilihat pada Gambar 1.1 menunjukkan bahwa rata-rata Indeks Pembangunan Manusia di Pulau Jawa tergolong menengah atas. Indeks Pembangunan Manusia di Pulau Jawa setiap tahunnya mengalami peningkatan. Tingkat Indeks Pembangunan manusia tertinggi di Pulau Jawa yaitu terdapat di Provinsi DKI Jakarta dan tingkat Indeks Pembangunan Manusia terendah di Pulau Jawa terdapat di provinsi Jawa Timur.

Pertumbuhan ekonomi adalah perkembangan kegiatan dalam perekonomian yang menyebabkan barang dan jasa yang dihasilkan masyarakat meningkat sehingga akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Menurut Katz, pembangunan adalah “perubahan dinamis dari suatu masyarakat secara keseluruhan, dari suatu negara ke negara lain, dengan konotasi bahwa negara lebih disukai: (Ashari et al., 2015). Selain itu, pembangunan ekonomi daerah merupakan suatu proses antara pemerintah daerah dan masyarakat dalam mengelola sumber daya yang ada dan membentuk kemitraan antara pemerintah daerah, swasta dan masyarakat untuk merangsang perkembangan pertumbuhan ekonomi di daerah (Nordiawan, 2007).

Dalam penelitian Profesor Kuznet dimana salah satu karakteristik pertumbuhan ekonomi modern adalah tingginya pertumbuhan output perkapita. (Todaro, 2006). Pertumbuhan output yang dimaksudkan adalah PDRB per kapita,

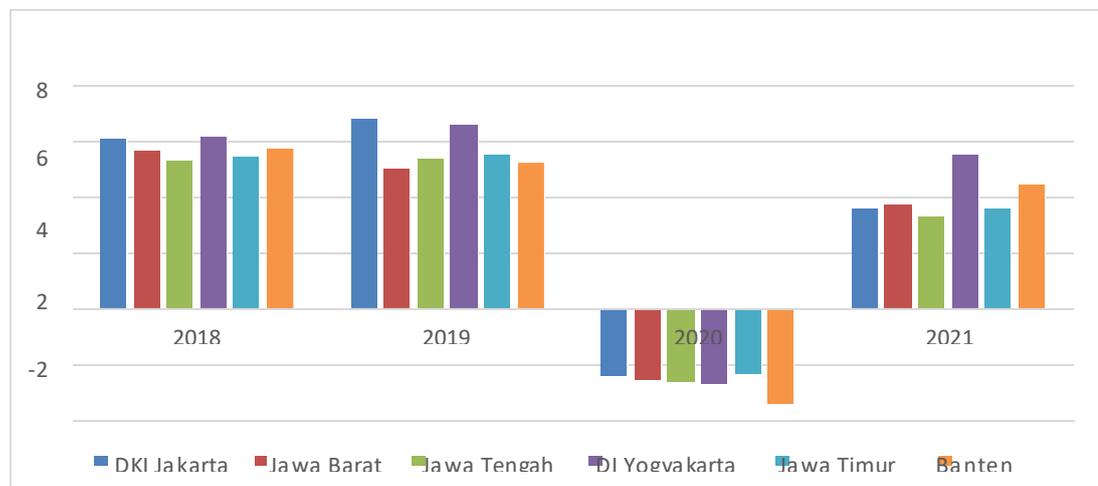
tingginya output per kapita dan merubah pola konsumsi dalam hal ini tingkat daya beli masyarakat juga akan meningkat. Tingginya daya beli masyarakat akan meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia karena daya beli merupakan salah satu indicator komposit dalam IPM yang disebut dengan indicator pendapatan.

Menurut Sukirno (2006:9) “pertumbuhan ekonomi merupakan gambaran dari perkembangan perekonomian dalam periode masa tertentu bila dibandingkan dengan masa sebelumnya dan perkembangan tersebut dinyatakan dalam bentuk presentase perubahan pendapatan nasional pada suatu periode dibandingkan dengan periode sebelumnya”.

Paradigma pembangunan saat ini adalah pertumbuhan ekonomi yang diukur dengan pembangunan manusia yang dilihat dengan tingkat kualitas hidup manusia (Mirza, 2011). Keberhasilan pembangunan diukur dengan beberapa parameter, dan paling populer saat ini adalah Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Berikunya perekonomian Indonesia perlahan bangkit menunjukkan perbaikan. Mengingat pertumbuhan ekonomi dihitung dari pertumbuhan PDB, maka model ini akan memperhitungkan PDB dalam menjelaskan perilaku IPM. Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indicator untuk melihat kinerja perekonomian, baik ditingkat nasional maupun regional (daerah). Pada dasarnya, pertumbuhan ekonomi adalah kenaikan output agregat (keseluruhan barang dan jasa yang dihasilkan oleh kegiatan perekonomian) atau Produk Domestik Bruto (PDB)

Parameter yang data dijadikan tolak ukur keberhasilan pembangunan suatu daerah adalah tingkat pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu, setiap daerah akan selalu berupaya untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang optimal untuk

membawa daerahnya kepada kehidupan yang lebih baik. Setiap pemerintah akan mengukur keberhasilan perekonomian daerahnya dengan berbagai indikator yang paling representative. Tentunya hal ini untuk mengetahui kemampuan kerja elemen pemerintahan dan semua pihak yang berkepentingan. Pertumbuhan ekonomi adalah salah satu tolak ukur yang dapat dipakai untuk meningkatkan pembangunan suatu daerah dari berbagai macam sektor ekonomi yang secara langsung menggambarkan tingkat perubahan ekonomi, pertumbuhan ekonomi berarti perkembangan kegiatan dalam perekonomian yang menyebabkan barang dan jasa yang diproduksi bertambah dan kemakmuran masyarakat meningkat. Indeks Pembangunan Manusia dan pertumbuhan ekonomi ini, memiliki hubungan yang erat. IPM yang tinggi akan mendorong tercapainya pertumbuhan ekonomi yang tinggi.



Gambar 1. 2 Laju pertumbuhan PDRB ADHK
(Sumber : Badan Pusat Statistik : Hasil Pengolahan Peneliti 2022)

Tabel 1. 2 Laju Pertumbuhan PDRB ADHK

	2018	2019	2020	2021
DKI Jakarta	6,11	6,82	-2,39	3,56
Jawa Barat	5,65	5,02	-2,52	3,74
Jawa Tengah	5,30	5,36	-2,65	3,32
DI Yogyakarta	6,20	6,59	-2,68	5,53
Jawa Timur	5,47	5,53	-2,33	3,57
Banten	5,77	5,26	-3,39	4,44

(Sumber : Badan Pusat Statistik : Hasil Pengolahan Peneliti 2022)

Selama Periode 2018-2021 Pertumbuhan Ekonomi di Pulau Jawa mengalami naik turun (fluktasi).

Kemiskinan merupakan masalah kompleks yang dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling berkaitan antara lain tingkat pendapatan masyarakat, pengangguran, kesehatan, pendidikan, akses terhadap barang dan jasa, lokasi geografis, gender, dan lokasi lingkungan. Kemiskinan tidak lagi dipahami hanya sebatas ketidakmampuan ekonomi, tetapi juga kegagalan memenuhi hak-hak dasar. Hak-hak dasar yang diakui secara umum meliputi terpenuhinya kebutuhan sandang, pangan, papan, kesehatan, pendidikan, pekerjaan, pendapatan, perumahan, sumber daya alam, lingkungan hidup, rasa aman dari perlakuan atau ancaman tindak kekerasan dan hak berpartisipasi dalam kehidupan social politik.

Ada beberapa teori tentang kemiskinan. Bank Dunia menggambarkan kemiskinan dengan mengadopsi standar kemampuan/daya beli, yaitu USD 1 atau USD 2 per kapita per hari. Sementara itu, BPS mendefinisikan kemiskinan berdasarkan prinsip-prinsip kemiskinan. Nilai kebijakan kemiskinan yang diterapkan untuk menentukan utang mengacu pada kualifikasi minimum yang dibutuhkan seseorang yang membutuhkan 2.100 kalori per kapita per hari, ditambah dengan kebutuhan minimum tidak makan, yaitu kebutuhan dasar

seseorang yang menyangkut sandang, sekolah, transportasi, kebutuhan imunotoksin, rumah tangga, dan individu yang mendasarinya. Menurut BPS seseorang/individu yang pengeluarannya lebih rendah dari Garis Kemiskinan dikatakan kalah. Sedangkan kemiskinan menurut National Human Development Report (2004) adalah suatu keadaan dimana seseorang atau sekelompok perempuan dan laki-laki tidak mampu memenuhi hak-hak fundamentalnya untuk mendukung dan meningkatkan taraf hidup yang berat. Hak Asasi Manusia yang mendasar tersebut meliputi: pemenuhan kebutuhan pangan, sandang, kesehatan, pendidikan, pekerja, kepunahan, air bersih, tanah, sumber daya alam dan lingkungan, serta wawasan keamanan dan strategi intimidasi kekerasan dan hak untuk berjuang dalam kehidupan social kenegarawan.

Ada dua kondisi yang menyebabkan kemiskinan bisa terjadi, yaitu kemiskinan alami dan kemiskinan buatan. Kemiskinan alami terjadi akibat dari sumber daya alam yang terbatas, penggunaan teknologi yang rendah dan bencana alam. Sedangkan, kemiskinan buatan diakibatkan oleh imbas dari para birokrat yang kurang berkompetendalam pengawasan ekonomi dan berbagai fasilitas yang tersedia, sehingga mengakibatkan susahny keluar dari kemelut kemiskinan tersebut.

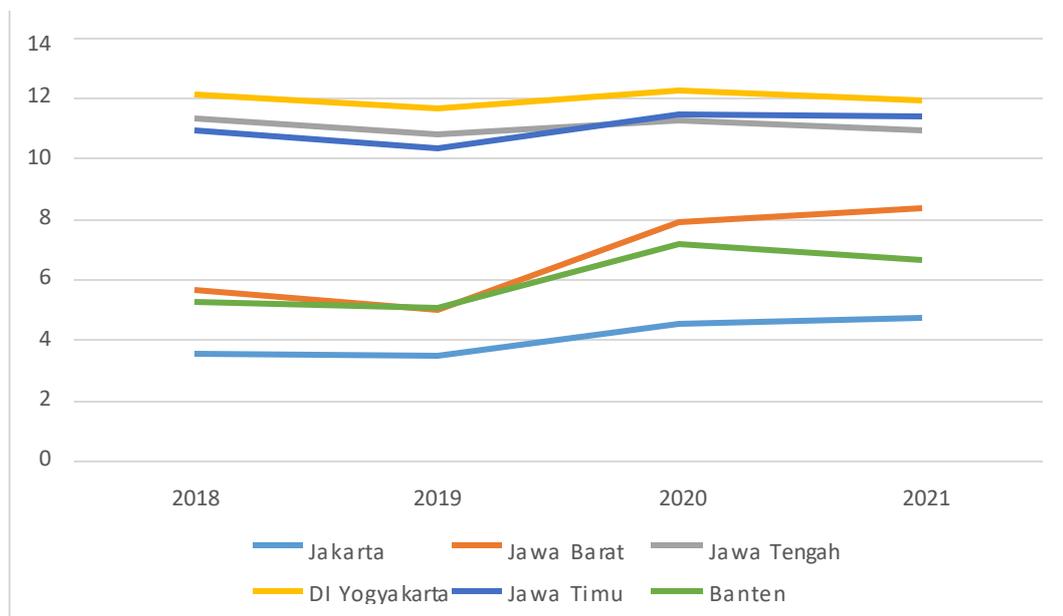
Indeks Pembangunan Manusia memiliki kaitan erat dengan tingkat kemiskinan disuatu negara. Jumlah penduduk miskin di suatu negara meningkat akan berpengaruh terhadap pemberdayaan peningkatan kualitas sumber daya manusia dan berimplikasi pada indeks pembangunan manusia (IPM). Masalah kemiskinan merupakan masalah sangat kompleks karena mencakup berbagai

bidang seperti bidang social, ekonomi, budaya dan aspek lainnya. IPM menunjukkan tingginya kualitas sumber daya manusia yang akan berdampak pada meningkatnya produktivitas kerja yang nantinya akan mempengaruhi perolehan pendapatan.

Peningkatan pendapatan membuat masyarakat mampu memenuhi kebutuhan hidupnya, sehingga tingkat kemiskinan dapat ditekan (Fadila & Marwan 2020). Perkembangan IPM di Pulau Jawa Tahun 2013-2020 mengalami peningkatan setiap tahunnya. IPM di Pulau Jawa Tahun 2013-2020 ini berada pada kategori “tinggi” karena terletak di antara 70-80. Namun, angka IPM lebih dekat dengan 70 (sedang) dari pada 80 (sangat tinggi). Selain itu, meski IPM pada Tahun 2020 adalah yang tertinggi, jumlah penduduk miskin justru meningkat. Hal ini menandakan bahwa masih perlunya perhatian terhadap IPM agar mampu untuk menurunkan tingkat kemiskinan.

Kemiskinan merupakan masalah yang cukup rumit, khususnya di negara berkembang seperti Indonesia, meskipun beberapa negara berkembang berhasil melakukan pembangunan dalam hal produksi dan pendapatan nasional (Sartika, Balaka, & Rumbia 2016). Di Pulau Jawa terdapat enam provinsi, di mana kemiskinan tertinggi berada di Jawa Timur dengan rata-rata 4.576,83 ribu jiwa selama tahun 2013-2020, sedangkan kemiskinan terendah terdapat di provinsi DKI Jakarta dengan rata-rata 352,99 ribu jiwa. Pemerintah masing-masing provinsi harus sesegera mungkin mencari solusi agar angka kemiskinan bisa teratasi. Jumlah penduduk miskin di masing-masing wilayah provinsi di Pulau Jawa Tahun 2013-2020 cenderung berfluktuasi, dengan penduduk miskin tertinggi berada di Provinsi Jawa Timur. Terjadi peningkatan jumlah penduduk miskin pada tahun 2020 di

semua provinsi yang mayoritas disebabkan oleh Covid-19 yang mematikan banyak usaha. Timbulnya kemiskinan juga dikarenakan rendahnya kemampuan masyarakat mengakses lapangan kerja dan sedikitnya peluang masyarakat untuk mendapat kesempatan kerja (Isnaini & Nugroho 2020). Secara umum, Indonesia sebagai negara berkembang masih memiliki jumlah penduduk miskin yang cenderung tinggi. Oleh karena itu, perlu adanya kebijakan yang akurat untuk mengetaskan masalah kemiskinan ini.



Gambar 1. 3 Presentase Penduduk Miskin

(Sumber: Badan Pusat Statistik : Hasil Pengolahan Peneliti 2022)

Tabel 1. 3 Presentase Penduduk Miskin

Tahun	DKI Jakarta	Jawa Barat	Jawa Tengah	DI Yogyakarta	Jawa Timur	Banten
2018	3,57	5,65	11,32	12,13	10,98	5,24
2019	3,47	5,02	10,80	11,70	10,37	5,09
2020	4,57	7,88	11,25	12,28	11,46	7,16
2021	4,72	8,40	10,93	11,92	11,40	6,66

(Sumber : Badan Pusat Statistik : Hasil Pengolahan Peneliti 2022)

Perkembangan penduduk miskin di pulau jawa dari tahun ke tahun berfluktuatif sehingga diperlukan beberapa program untuk meminimalisasi tingkat fluktuasinya dan dengan demikian pembangunan manusia dapat lebih stabil. Dari data diatas dapat disimpulkan angka kemiskinan terendah berada di provinsi DKI Jakarta dan angka angka kemiskinan tertinggi berada di Jawa Tengah. Dan setiap tahunnya angka kemiskinan mengalami penurunan. Kepala BPS Suhariyanto menjelaskan, dari total penduduk miskin tersebut, Pulau Jawa masih memiliki jumlah terbanyak dari pulau-pulau lainnya. Terdapat 12,56 juta orang miskin di Pulau Jawa dengan tingkat persentase sebesar 8,29%.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan pendapatan yang diperoleh daerah dengan cara melakukan pemungutan kepada masyarakat sesuai dengan peraturan daerah berdasarkan perundang-undangan. Pendapatan daerah juga berasal dari Dana Perimbangan, dana ini merupakan dana yang di transfer pemerintah pusat kepada daerah dikarenakan adanya ketimpangan fiscal antar daerah.

Struktur APBD menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah daerah, dan Pembiayaan Daerah. Pendapatan Daerah yang tercantum dalam APBD bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan dan pendapatan lain-lain. PAD merupakan salah satu sumber penerimaan yang diperoleh daerah untuk memenuhi segala pengeluaran dalam bentuk belanja daerah. PAD berasal dari pajak daerah yang dibayar oleh pajak wajib di daerah tersebut, retribusi daerah, BUMD, dan pendapatan lain yang disahkan.

Granof (2007) menyatakan bahwa pendapatan dalam pemerintah harus tersedia untuk membayar kewajiban dari periode saat ini yang sedang berlangsung sebelum dapat diakui. Focus dalam pengukuran pendapatan tersebut diantaranya sumber-sumber keuangan saat ini seperti kas, piutang, surat berharga, dan persediaan serta asset modal seperti tanah, gedung, dan peralatan tidak diperhitungkan dalam pemerintahan melainkan dalam aktivitas pemerintah.

Sumber – sumber keuangan utama daerah yang digunakan untuk membiayai belanja daerah adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pada kenyataannya PAD antara satu daerah dan daerah lainnya memiliki perbedaan jumlah yang cukup signifikan. Sehingga melalui Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah terdapat sumber lainnya yang dapat digunakan dalam pembangunan daerah yaitu dana perimbangan yang terdiri dari Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Bagi Hasil (DBH), sertalain-lain pendapatan yang sah.

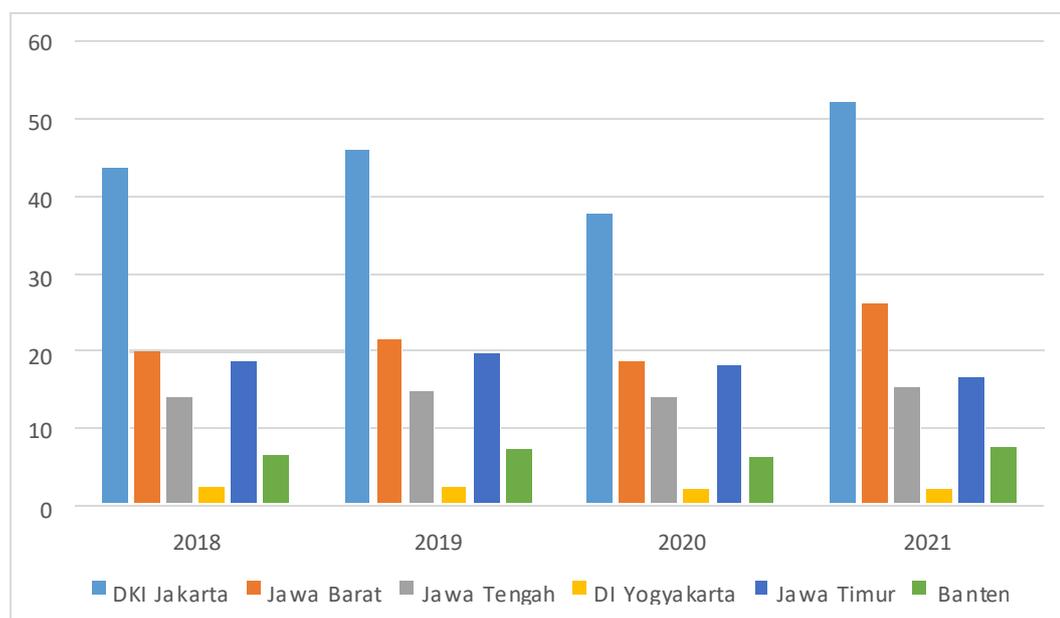
Pambudi (2008) menyatakan, pembangunan daerah yang dilakukan secara otonomi harus disertai dengan penguatan penerimaan fiskal daerah sebagai landasan pelaksanaan pembangunan daerah. Hal ini menurut setiap daerah agar dapat mengoptimalkan pendapatan asli daerah sebagai sumber penerimaan dan pembiayaan daerah. Otonomi daerah dan desentralisasi fiskal mengharapkan pemerintah daerah memiliki kemandirian yang lebih besar dalam keuangan daerah. Oleh karena itu, peranan pendapatan asli daerah sangat menentukan kinerja keuangan daerah. Dengan potensi yang dimiliki oleh daerah diharapkan dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan penerimaan daerah yang dapat digunakan untuk

membayai segala kewajiban dari pemerintah daerah dalam menjalankan kegiatan pemerintahan daerah, termasuk untuk digunakan dalam meningkatkan infrastruktur daerah (Kusnandar & Dodik SSiswantoro, 2012).

Melalui otonomi daerah dan desentralisasi fiskal, pemerintahan daerah memiliki wewenang untuk menggali pendapatan dan melakukan peran alokasi secara mandiri dalam menetapkan prioritas pembangunan diharapkan dengan adanya otonomi dan desentralisasi fiskal dapat lebih pemeratakan pembangunan sesuai dengan aspirasi local untuk mengembangkan wilayah menurut potensi daerah guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Hadi Sasana, 2009).

Menyoroti keuangan daerah era reformaso di Indonesia tidak bisa dilepaskan dari kebijakan desntralisasi fiskal. Kebijakan desentralisasi fiskal dipilih sebagai salah satu cara untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi ekonomi publik agar terjadi peningkatan layanan publik dan peningkatan kesejahteraan masyarakat (Oates, 1972) dalam Martines-Vazquez dan McNab, 2003). Dengan desentralisasi fiskal diharapkan terjadi peningkatan *revenue* melalu dana transfer dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah, peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) dan terjadi penghematan pembelanjaan pemerintah sehingga menaikkan efisiensi pembelanjaan, yang pada akhirnya meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah.

Pendapatan daerah tersebut mampu meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) pada suatu daerah, yang dikarenakan pengalokasian masing-masing pendapatan bertujuan untuk kesejahteraan masyarakat pada daerah tersebut.



Gambar 1.4 Realisasi Pendapatan Asli Daerah

(Sumber : Badan Pusat Statistik : Hasil Pengolahan Peneliti 2022)

Tabel 1.4 Realisasi Pendapatan Asli Daerah

Tahun	DKI Jakarta	Jawa Barat	Jawa Tengah	DI Yogyakarta	Jawa Timur	Banten
2018	43.372	19.642	13.711	2.041	18.531	6.329
2019	45.707	21.244	14.437	2.082	19.372	7.022
2020	37.414	18.521	13.668	1.876	17.953	5.906
2021	51.891	25.996	14.974	1.849	16.277	7.246

(Sumber : Badan Pusat Statistik : Hasil Pengolahan Peneliti 2022)

Dilihat dari data diatas, Pendapatan Asli Daerah di Pulau Jawa terus mengalami kenaikan disetiap tahunnya, Pendapatan Asli Daerah tertinggi terdapat di Provinsi DKI Jakarta dan Pendapatan Asli Daerah terendah terdapat Di Provinsi DI Yogyakarta.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul **“Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Kemiskinan, Dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Di Pulau Jawa Periode 2010-2021”**.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan pada latar belakang, maka identifikasi masalah dalam penelitian ini diantaranya:

1. Bagaimana pengaruh pertumbuhan ekonomi, kemiskinan dan Pendapatan Asli Daerah secara parsial terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Pulau Jawa periode 2010-2021?
2. Bagaimana pengaruh pertumbuhan ekonomi, kemiskinan dan Pendapatan Asli Daerah secara bersama-sama terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Pulau Jawa periode 2010-2021?

1.3 Tujuan Penelitian

Sesuai dengan identifikasi masalah yang telah di paparkan, maka tujuan yang ingin dicapai dengan penelitian ini diantaranya:

1. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh pertumbuhan ekonomi, kemiskinan, dan Pendapatan Asli Daerah secara parsial terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Pulau Jawa periode 2010-2021.
2. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh pertumbuhan ekonomi, kemiskinan, dan Pendapatan Asli Daerah secara bersama-sama terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Pulau Jawa periode 2010-2021.

1.4 Kegunaan Hasil Penelitian

Hasil penelitian yang diperoleh diharapkan dapat berguna bagi berbagai pihak, adapun kegunaan dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Kegunaan teoritis Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan bukti empiris mengenai pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Kemiskinan

serta Pendapatan Asli Daerah terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Pulau Jawa periode 2010- 2021.

2. Kegunaan praktis Penelitian ini diharapkan mampu memberikan kegunaan praktis bagi mahasiswa maupun instansi.
 - a. Bagi mahasiswa diharapkan dapat mengaplikasikan teori yang didapat selama proses perkuliahan serta mendapat pengetahuan dan informasi baru dari penelitian ini.
 - b. Bagi instansi Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai referensi bagi instansi dalam merumuskan kebijakan yang akan dilakukan dalam kaitannya dengan Pertumbuhan Ekonomi, Kemiskinan serta Pendapatan Asli Daerah terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Pulau Jawa.

1.5 Lokasi dan Jadwal Penelitian

1.5.1 Lokasi Penelitian

Pada penelitian ini penulis menggunakan sumber data sekunder dari berbagai akses dari website maupun situs web lainnya, dan lokasi penelitian dilakukan di perpustakaan umum Universitas Siliwangi Tasikmalaya Dengan demikian penulisdidak melakukan penelitian secara primer yang membutuhkan lokasi untuk penelitian.

1.5.2 Jadwal Penelitian

Tabel 1. 5 Jadwal Penelitian

Keterangan	April				Mei				Juni				Sept				Okt				Nov				Des			
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
Pengajuan Judul	■																											
Penyusunan Usulan Penelitian		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■																
Sidang Usulan Penelitian												■																
Revisi Usulan Penelitian													■	■	■	■												
Penyusunan Skripsi																	■	■	■	■								
Sidang Skripsi																						■						
Revisi Skripsi																							■	■	■	■	■	■